

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pariwisata sangat bergantung pada partisipasi dan kontribusi dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran khusus dan berkontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Secara khusus, pemerintah akan berfokus pada fasilitasi dan regulasi, sementara sektor swasta akan mengambil peran yang lebih aktif dalam pelaksanaan dan kemajuan. Selain itu, masyarakat merupakan komponen kritis dari upaya pengembangan. Penting untuk meningkatkan fungsi dan kapasitasnya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat dari perkembangan, tetapi juga berkontribusi aktif pada keberhasilan pariwisata di wilayah masing-masing.

Peran serta kontribusi signifikan dari berbagai pihak inilah yang membuat pariwisata sebagai sektor yang strategis serta penanganan yang serius dan profesional. Di negara kita, sektor pariwisata telah Memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan pemasukan devisa bagi negara, serta berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, seterusnya juga memberikan dampak dari ekonomi yang berlipat-lipat yang mencapai berbagai lapisan rantai di dalam usaha ekonomi, terkhusus pada sektor UMKM, dan juga berkontribusi dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan, dan juga memanfaatkan sumber daya alam serta budaya lokal yang arif dan bijaksana.

Terciptanya iklim yang kondusif pada pembangunan pariwisata di Indonesia juga dikenal suatu konsep dengan sebutan Sadar Wisata. Sadar Wisata juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang mendeskripsikan dukungan

serta partisipasi semua pihak dalam mendongkrak untuk mewujudkan iklim yang kondusif dalam pembangunan pariwisata di satu sebuah wilayah. Dari sebuah konteks itu terdapat salah satu konsep yang dapat diartikan terciptanya satu unsur serta kondisi yang dapat mendongkrak tumbuh serta berkembangnya industri kepariwisataan, yang dimana terdapat unsur indah, aman, ramah, tertib, sejuk, bersih, dan unsur kenangan yang dikenal juga sebagai *sapta pesona*. Semua unsur tersebut sangat kuat dan melekat di dalam pengembangan pariwisata selama dua puluh tahun terakhir, dan juga sudah menjadi pilar utama dalam upaya pertumbuhan dan berkembangnya destinasi pariwisata di Nusantara.

Konsep sadar wisata telah menjadi faktor utama dalam mewujudkan serta membenahi internal kondisi dari produk kepariwisataan, dalam rangka menumbuhkan citra demi persaingan kepariwisataan di negara kita yang lebih baik untuk bisa berkompetisi pada fase regional dan internasional, untuk tercapainya visi dan misi pertumbuhan pariwisata yang di impikan.

Pelaksanaan sadar wisata dengan melibatkan masyarakat dalam memacu peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam usaha mewujudkan sadar wisata berbasis masyarakat yang merupakan salah pendekatan pemberdayaan dimana menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan berkelanjutan. Konsep ini melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi mereka.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Pemerintah Kota Pekanbaru terus mengembangkan sektor pariwisata sebagai alternatif pertumbuhan ekonomi, salah satu upaya tersebut adalah dengan pengembangan dan pembagunan desa

wisata yang dewasa ini sedang giat dijalankan. Dengan adanya desa wisata di wilayah yang dikenal dengan "Negeri Lancang Kuning" ini, yang dimana mulai dikenal di kancah nasional, "Negri Lancang Kuning" juga memiliki potensi desa wisata yang mandiri, Saat ini di Provinsi Riau tercatat memiliki 1.859 desa/kelurahan, menyebar pada 12 Kota dan Kabupaten. Dari jumlah tersebut, serta 123 desa/kelurahan diproyeksikan sebagai desa wisata, Penyebaran Desa Wisata di Riau Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Jumlah Desa Wisata di Kabupaten dan Kota

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa Wisata
1	Bengkalis	15
2	Indragiri Hilir	9
3	Indragiri Hulu	5
4	Kampar	16
5	Kepulauan Meranti	4
6	Kuantan Singingi	21
7	Pelalawan	11
8	Rokan Hilir	4
9	Rokan Hulu	6
10	Siak	24
11	Dumai	3
12	Kota Pekanbaru	5
TOTAL		123

(Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024)

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat, karena mengeliatnya ekonomi pada desa wisata sudah tampak pada setiap kabupaten di Riau. Jumlah tersebut menghadirkan pilihan bagi para pengunjung dalam menikmati alam terbuka, Sambil merasakan pariwisata baik di masyarakat pedesaan maupun perkotaan. di Provinsi Riau.



Gambar 1.1 Peta penyebaran Desa Wisata Provinsi Riau

Dari penyebaran desa wisata tersebut terdapat ID Desa, Nama Desa Wisata, Klasifikasi, Kategori dan peringkat Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) setiap tahunnya serta status dari masing masing desa wisata. Untuk kategori Desa Wisata terbagi atas 4 kasifikasi yaitu:

- Rintisan: Desa Wisata yang baru di bentuk dan sudah beroperasi serta masih banyak keterbatasan.
- Berkembang: Desa Wisata yang sudah beroperasi serta telah memiliki struktur keanggotaan dan kepengurusan.
- Maju: Desa Wisata yang telah berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Mandiri: Desa Wisata yang sduah ramai pengunjung dari berbagai lingkup.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata serta keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Nomor: KPTS. 800/BUDPAR-KHKP/54.a tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) “Kampung Bandar” Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, yang dimana menjadi salah satu Strategi dalam melibatkan masyarakat sebagai subjek pariwisata yang bertujuan mengoptimalkan potensi lokal untuk mengimbangi peran pelaku usaha besar. Meski berskala lokal, pendekatan ini perlu ditempatkan dalam konteks kerjasama global untuk memberikan dampak pemberdayaan yang lebih luas.

Pariwisata di Kota Pekanbaru berperan penting dalam pembangunan fasilitas pendukung dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai sektor

terkait. Daya tarik wisata di kota ini mencakup aspek sejarah, budaya, pendidikan, dan alam. Perkembangan ini mendorong pertumbuhan fasilitas hiburan baru yang tersebar merata di seluruh kota.

Menurut Rencana Strategis (Rencana Strategis) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru untuk tahun 2023–2026, ada tiga destinasi wisata populer di Pekanbaru. Tabel 1.2 di bawah ini menunjukkan pariwisata yang berpotensi untuk tumbuh lebih lanjut:

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan

No.	Destisnasi Wisata	Tempat	Banyak Kujjungan (Orang) 2019-2022
1.	Desa Wisata Heritage Kampung Bandar	Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan	10.945
2.	Desa Kawasan Wisata Danau Bandar Khayangan	Kelurahan Sungai Ambang Kecamatan Rumbai Pesisir	31.169
3.	Desa Wisata Okura	Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir	12.856

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2022

Kelurahan Kampung Bandar, yang merupakan kota tua Pekanbaru, dianggap sebagai asal-usul kota ini. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai area cagar budaya dan mencakup area seluas 35,62 hektar yang terbagi menjadi beberapa unit administratif.

Menurut website jejaring desa wisata yang dikelola oleh kementerian ekonomi kreatif (Jadesta), desa wisata Kampung Bandar menawarkan berbagai paket wisata, termasuk wisata sejarah budaya, gerai ekonomi kreatif, dan rumah tenun. Fasilitas pendukung seperti restoran terapung, ATM, area selfie, dan

berbagai amenities lainnya juga tersedia. Selain itu, desa ini juga menyelenggarakan berbagai atraksi budaya seperti pertunjukan seni dan festival.

Desa Wisata Kampung Bandar sendiri diusulkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjadi Destinasi Tujuan Wisata (DTW) pada tahun 2011, dan dengan dibentuknya Pokdarwis “Kampung Bandar” Desa Wisata Kampung Bandar berfokus pada pengembangan pariwisata. Menariknya Desa Wisata Kampung Bandar ini tidak hanya didirikan atas usulan Pemerintah Kota Pekanbaru saja melalui pembentukan Pokdarwis Kampung Bandar, yang dimana melibatkan kerjasama antar masyarakat di Kelurahan Kampung Bandar secara menyeluruh dalam segala proses pembangunan Desa Wisata di Kampung Bandar. Yang diawali dari tahap perencanaan, pengelolaan, pembangunan, dan pengawasan, sampai pada manfaat yang diharapkan dari pembangunan destinasi wisata. Pengembangan pariwisata dengan karakteristik seperti itu juga dapat disebut sebagai pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT).

"Pariwisata berbasis masyarakat adalah jenis pariwisata yang hadir untuk melengkapi dampak negatif dari wisatawan konvensional atau massal," klaim Giampiccoli & Saayman (2018). Karena dikembangkan oleh masyarakat lokal yang menggabungkan berbagai elemen lokal seperti bisnis, organisasi, dan pemerintah daerah, pariwisata berbasis masyarakat, atau CBT, lebih dikenal sebagai pariwisata skala kecil (Adikampana 2017:7). Menurut Timothy dan Boyd (2003), "pariwisata berbasis komunitas sebagai partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata" adalah pernyataan yang adil. Dalam hal ini, ada dua metode untuk melibatkan masyarakat: berbagi manfaat pariwisata dan

mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Murphy (1985) menegaskan bahwa pariwisata adalah "industri masyarakat", yang berarti bahwa dukungan dan penerimaan publik terhadap sektor ini sangat penting untuk kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang (Adikampana, 2017:5).

Keberhasilan pengembangan Desa Wisata Kampung Bandar dibuktikan dengan terbentuknya Pokdarwis Kampung Bandar melalui Desa Wisata Kampung Bandar termasuk nominasi sekaligus mendapatkan penghargaan 300 Besar dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai simbol Kebangkitan Nasional. Desa ini merupakan binaan PT. Pertamina Hulu Rokan, yang menerapkan konsep kerjasama pentahelix melibatkan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Jadesta, 2024).



Gambar 1.2 Piagam Penghargaan Anugrah Desa Wisata Indonesia

Sejak pengelolaan Pokdarwis di Desa Wisata Kampung Bandar sekitar sepuluh tahun yang lalu, Kampung Bandar, Pokdarwis telah banyak diuntungkan dari pariwisata berbasis masyarakat dan keterlibatan masyarakat. Wajar saja, upaya Pokdarwis dan masyarakat untuk memberdayakan diri melalui Pariwisata

Berbasis Masyarakat (CBT) merupakan bagian integral dari pencapaian ini. "Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan harkat, martabat, dan jati diri semaksimal mungkin untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya," jelas (Widjaja, 2003:169).

Di bidang penelitian sosial, studi tentang pemberdayaan telah lama dilakukan. Entah peran masyarakat dalam pemberdayaan adalah penekanan eksklusif dari literatur penelitian, atau peran BUMDes/BUMNag adalah fokus utama. Sementara itu, penulis dalam penelitian ini mencoba untuk menentukan bagaimana implementasi pemberdayaan berbasis masyarakat dan juga manajemen dari kepengurusan Pokdarwis harus menjadi komponen penting dari program pemberdayaan jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penyelidikan dan studi menyeluruh terhadap struktur *Enabling* dan *Contraining* dalam mengkaji upaya Pokdarwis dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan berbasis masyarakat secara komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat dilihat bahwasanya kehadiran Pokdarwis untuk kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang penting bagi pembangunan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat di perkotaan yang dimana ketimpangan sangat jelas sekali. Oleh karena itu, pemerintah daerah tengah gencar mendorong agar setiap Desa Wisata di kelola secara serius dan profesional di wilayahnya. Dan Pokdarwis "Kampung Bandar" yang merupakan kelompok sadar wisata yang terbentuk selama 10 tahun ini bertindak sebagai

pengelola Desa Wisata Kampung Bandar. Pokdarwis Kampung Bandar ini bergerak dalam bidang pengembangan wisata berbasis masyarakat. Desa Wisata Kampung Bandar berhasil Penghargaan sebagai 300 Besar se-Indonesia dalam Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada tahun 2022. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya panjang yang dilakukan Pokdarwis dan masyarakat setempat melalui pengelolaan destinasi wisata berbasis CBT, sehingga penulis pun tertarik untuk mengkaji lebih dalam, terkait: **Bagaimanakah implementasi konsep CBT dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kampung Bandar?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Menjelaskan implementasi konsep CBT dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan implementasi CBT oleh pokdarwis dalam pemberdayaan masyarakat dengan CBT.
2. Mengidentifikasi struktur *enabling* (memampukan) dan *constraining* (menghambat) dalam CBT.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang inisiatif pemberdayaan masyarakat berbasis CBT. Selain membantu pihak lain yang tertarik dengan subjek yang sama, penulis berpendapat bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada tataran akademik dan praktis.

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan di bidang akademik, khususnya di bidang sosiologi pemberdayaan dan menjadi acuan bagi mahasiswa jurusan sosiologi. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang topik-topik yang berkaitan dengan sosiologi pemberdayaan, terutama dengan mengacu pada implementasi konsep CBT dalam pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (CBT). Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat mengkarakterisasi jenis keterlibatan masyarakat dalam pertumbuhan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) dan mengidentifikasi faktor memampukan (*enabling*) dan membatasi (*constraining*) dalam pelaksanaan CBT.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti lain dan siapa saja yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini. Pembuat kebijakan, profesional praktisi, dan pemangku kepentingan diperkirakan akan menemukan nilai besar dalam temuan penelitian, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga diharapkan dapat membantu peneliti lain yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah tersebut. Selain itu, studi ini dapat membantu pejabat pemerintah dan pelaku pemberdayaan lainnya lebih memahami sifat hambatan dan mendukung inisiatif pemberdayaan sosial yang sukses. Sebab itu, penelitian ini dibentuk secara sistematis dan sedemikian rupa sehingga memungkinkan para akademisi lain untuk menggunakannya untuk penelitian pemberdayaan masyarakat.